Ribuan

Sambungan hal 1

Plt Kasatpol PP DIY Drs Noviar Rahmad MSi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP DIY Ilham Junaidi mengatakan, nobar ini bukan hanya mendukung perjuangan Timnas Indonesia, tapi juga meningkatkan kebersamaan dalam memerangi peredaran rokok ilegal di DIY.

Menurutnya, peredaran rokok ilegal selain merugikan perekonomian negara dari sisi penerimaan, juga merugikan kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Satpol PP DIY dan Bea Cukai Yogyakarta bersama semua pihak telah berupaya keras menekan peredaran rokok ilegal.

"Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kami terus meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum agar masyarakat memahami pentingnya memilih produk yang sesuai peraturan perundangan (bukan rokok ilegal). Mari kita bersama-sama tekan peredaran rokok ilegal di DIY," katanya.

Turut hadir dalam acara nobar tersebut, Direktur Utama PT BP *Kedaulatan Rakyat* Drs HM Idham Samawi beserta istri, Hj Sri Surya Widati dan jajaran Direksi PT BP *KR*, jajaran Satpol PP DIY dan Bea Cukai Yogyakarta, perwakilan Satpol PP Kabupaten/Kota se-DIY, perwakilan BNNP DIY, perwakilan General Manager JCM dan tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Nobar sekaligus Direktur Keuangan PT BP *KR* Yuriya Nugroho Samawi MSc mengatakan, antusiasme warga untuk nobar Timnas sangat luar biasa, hingga meluber. Yuriya memastikan penyelenggaraan nobar ini sama sekali tidak ada unsur politik atau terkait dengan paslon Pilkada.

Menurut Yuriya, melalui acara ini dan pemberitaan, *KR* ikut menyukseskan program Pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal. Selain itu nobar menjadi hiburan bagi masyarakat, sekaligus mendukung Timnas. "Ini sejalan dengan tagline *KR* yaitu *Migunani Tumpraping Liyan*. Semoga kerja sama dengan Satpol PP DIY dan Bea Cukai Yogyakarta terus berlanjut," harapnya. **(Dev)-f**

Pejabat

Sambungan hal 1

tapi semua pihak itu ingin memastikan pemilu, pemilukada, benar-benar luber dan jurdil," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/11).

Seperti diketahui, MK memutuskan, pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang tidak netral, yakni membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada, bisa dijatuhi pidana penjara dan/atau denda.

Ketentuan tersebut merupakan putusan MK yang memasukkan frasa "pejabat daerah" dan "anggota TNI/ Polri" ke dalam norma Pasal 188 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan No 136/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/11).

Pasal 188 UU 1/2015 berbunyi: "*Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 atau paling banyak Rp 6.000.000,00*".

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar pun mengingatkan kembali aparat pemerintah untuk bersikap netral dan tidak menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya untuk memotori pasangan calon tertentu pada pilkada.

"Kita perlu dukung, biarlah yang berkontestasi itu pasangan calon dan tim. Semua penyelenggara negara, aparat negara, aparat pemerintah, memberikan dukungan, tapi tidak usah ikut campur dalam kontestasi itu, apalagi ikut menjadi pihak yang mengarahkan suara atau mencarikan suara," tuturnya.

Sebaliknya, lanjut Zulfikar, berikan kewenangan kepada rakyat yang memiliki hak untuk menentukan kepala daerahnya masing-masing. "Biarlah pemilih yang memutuskan siapa calon-calon kepala daerah yang menurut mereka memang sanggup untuk membawa daerah masing-masing menjadi lebih baik," ujarnya.

Menurut MK, Pasal 188 UU 1/2015 merupakan norma yang berpasangan dengan Pasal 71. Dalam perkembangannya, Pasal 71 mengalami perubahan melalui UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya pada ayat (1).

Dalam UU 1/2015, Pasal 71 ayat (1) hanya memuat Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/ 2016 terdapat penambahan dua subjek hukum baru, yakni "pejabat daerah" dan "anggota TNI/Polri". Meskipun Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015 yang merupakan norma primer telah mengalami perubahan, faktanya perubahan tersebut tidak dimasukkan ke dalam norma Pasal 188 UU 1/2015 yang merupakan norma sekunder.

Terlebih UU 10/2016 tidak mengubah norma Pasal 188 sehingga untuk norma sekunder yang mengatur pemidanaan tetap berlaku dan mengacu pada Pasal 188 UU 1/2015. Kondisi ini, menurut MK, menjadikan tidak adanya kepastian dan kesesuaian hukum terkait dengan norma pemidanaan terhadap dua subjek hukum baru yang ditambahkan, yakni pejabat daerah dan anggota TNI/Polri. **(Ant/Obi)-d**

Prabowo

Sambungan hal 1

Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of The Sun of The Peru atau Ordo Matahari Peru merupakan penghargaan yang diberikan Peru kepada warga negaranya dan orang asing yang telah berjasa luar biasa dalam bidang-bidang seperti seni, sastra, budaya maupun politik. Penghargaan ini ditetapkan pertama kali pada tahun 1821 dan menjadi yang tertua di Amerika.

Presiden Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas penghargaan yang diterimanya tersebut. Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah dan masyarakat Peru. "Ini adalah penghormatan yang luar biasa," ucap Presiden.

Kunjungan ini sekaligus menandai lawatan resmi pertama Prabowo ke Peru sebagai Presiden RI. Kepala Negara juga mengundang Presiden Peru untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia tahun depan. Ajakan ini ditujukan untuk memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru yang akan dirayakan pada 2025.

Pertemuan antara Prabowo dan Presiden Peru menghasilkan sejumlah kesepakatan, mulai dari perjanjian ekonomi komprehensif, pemberantasan narkotika, hingga membuka akses pasar untuk produk Peru di Indonesia.

Presiden Prabowo bertemu Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Palacio de Gobierno Lima Peru merayakan 50 tahun hubungan diplomatik yang telah dijalin kedua negara. Presiden Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden Peru saat tiba di Istana Peru Palacio de Gobierno Lima.

Pada bagian lain Presiden Prabowo Subianto mengatakan, terobosan teknologi yang berkembang pesat belakangan ini menuntut para pemimpin di dunia untuk lebih bijak dan sabar dalam menyikapi segala hal.

"Planet kita menjadi lebih kecil. Kita sekarang berada di dunia yang penuh dengan terobosan teknologi yang luar biasa, sehingga menuntut para pemimpin untuk lebih bijak, lebih sabar dan lebih akomodatif," ujar Prabowo saat berbicara dalam forum APEC CEO Summit 2024 di Peru, Kamis (14/11) waktu setempat, sebagaimana tayangan video YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, kemarin. **(Ant/Bro)-d**

Potensi

Sambungan hal 1

sebagai mesin pertumbuhan, karena mampu memberikan alternatif yang baik dalam berbisnis maupun menciptakan peluang kerja global.

Ada perubahan konstelasi pekerja online global sampai tahun 2022 dimana terjadi penurunan tenaga kerja online di US (dari 9% ke 2.5%) dan kenaikan 2.6% di Rusia dan Ukraina. Perang Ukraina membuka kesempatan besar peningkatan terserapnya potensi tenaga kerja online global. Kondisi yang menarik karena disamping menyediakan alternatif pekerjaan bagi masyarakat, juga mampu mendorong inovasi dan produktivitas

Laporan UNDP 2022 menyebutkan bahwa tingginya proyeksi nilai ekonomi serabutan di Indonesia yakni USD 145 miliar belum menyentuh dan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Padahal sektor ini menciptakan peluang digital yang lebih inklusif untuk kaum muda dan penyandang disabilitas. Kondisi ini disebabkan rendahnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sebuah hal penting untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan dan inklusif, terutama di daerah terpencil yang kurang terhubung secara digital.

Mengingat progam unggulan keempat Presiden Prabowo Subianto mencakup penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, penulis berharap adanya pemfokusan program penguatan ketrampilan digital, peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan regulasinya sebagai bagian penting dari program unggulan tersebut.

Harapannya terjadi peningkatan secara signifikan penyerapan tenaga kerja digital online. Perlu diketahui bahwa saat ini ekonomi gig Indonesia masih didominasi pada bidang transportasi dan penghantaran.

Sebagai negara dengan populasi muda yang besar, Indonesia memiliki keuntungan demografis yang dapat dimanfaatkan. Kondisi kesenjangan keterampilan digital yang ada, terjadi karena hanya sebagian kecil dari populasi yang memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan untuk berkontribusi dalam ekonomi digital. Peningkatan keterampilan digital di kalangan tenaga kerja muda dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Ketika pekerja memiliki kemampuan digital yang relevan seperti pengembangan perangkat lunak, desain grafis, atau analisis data, mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital global, membuka peluang baru untuk pekerjaan online, freelancing, dan pekerjaan gig berbasis web. Sebagai tambahan peningkatan keterampilan digital jangka panjang juga berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan akses terhadap pekerjaan, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Walaupun tingkat penetrasi internet saat ini cukup tinggi yakni 79,5%, tetapi untuk memenuhi pengembangan ekonomi digital, kecepatan masih kurang.

Berdasarkan data dari Speedtest Global Index per Juni 2024, kecepatan unduh internet mobile global rata-rata mencapai 56,43Mbps. Indonesia berada di peringkat ke-80 dari 108 negara, memiliki kecepatan unduh median hanya 28,35Mbps. Lambatnya kecepatan internet ini menjadi penghambat pertumbuhan di berbagai sektor industri digital, yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu peningkatan dan pemerataan infrastruktur penting untuk diprioritaskan.

Hal lain yang pelu diperhatikan dalam Ekonomi serabutan adalah regulasi, utamanya menyangkut tantangan kurangnya perlindungan tenaga kerjanya maupun jaminan sosial. Banyak negara yang menggodok regulasi untuk melindungi pekerja gig. Di Indonesia, regulasi sektor ini masih lemah, dan perlu diperkuat agar pekerja terlindungi dan ekonomi tetap tumbuh. Akhir kata selamat bertugas Presiden Prabowo dan Kabinet "Merah Putih".

(Penulis, Guru Besar Prodi Teknik Informatika FT UAJY dan Anggota "Forum Studi Ekonomi Digital"Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY)-f

G2RT-MES DIY Bersinergi Berdayakan Masyarakat

YOGYA (KR) - Misi Global Gotong Royong Tetrapreneur (G2RT) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memiliki banyak kesamaan. Jika hal itu ditindaklanjuti dengan sinergi dan kolaborasi akan lebih cepat mewujudkan tujuan. G2RT merupakan gerakan dari bawah dan banyak berperan memberdayakan serta mengatasi kemiskinan.

"Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan manajemen kultur dan local wisdom, jadi jangan menganggap lingkungan sekitar adalah empty space," kata Ketua Umum Badan Pengurus Harian MES DIY Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc dalam acara Penjualan Mitra Global Gotong Royong Tetrapreneur di Gedung Kresna, Biro Tata

KR-Istimewa

Prof Edy Suandi Hamid

Pemerintahan DIY, Jumat (15/11). Turut hadir Kepala Bagian Rekayasa Sosial Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Danang Samsurizal ST.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 25 peserta itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara MES DIY dengan Founder, Konseptor, dan Tenaga Ahli Model G2RT Rika Fatimah PL MSc PhD.

Edy mengatakan, Indonesia menghadapi banyak persoalan yang sudah menjadi gerakan G2RT. Pemberdayaan masyarakat adalah tugas semua, jadi bagaimana mereka berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengentasan kemiskinan menjadi penting.

Rika menyampaikan, terdapat empat tetra dalam model G2RT, yakni rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha. G2RT sudah bergerak di luar DIY, dan bekerja sama dengan beberapa kementerian. "G2RT tidak saja bergerak di regional, tetapi juga nasional dan global," ujarnya. **(Ria)-f**

Jepang

Sambungan hal 1

Indonesia coba langsung tampil menyerang untuk meraih kemenangan. Sejumlah peluang datang silih berganti lewat Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick. Terus menekan, Indonesia justru kecolongan saat di menit ke-35, umpan Daichi Kamada yang meluncur di depan gawang disambut sepakan Koki Ogawa, namun Justin Hubner yang coba memotong laju bola justru membuat bola meluncur ke dalam gawang.

Kebobolan satu gol membuat lini pertahanan Indonesia rapuh. Hanya berselang lima menit, tim tamu sukses menggandakan keunggulan jadi 2-0 lewat gol Takumi Minamino usai memaksimalkan umpan Kaoru Mitoma. Tertinggal dua gol di babak pertama membuat Indonesia langsung coba bangkit di paruh kedua laga. Sayangnya, Jepang yang lebih berpengalaman mampu mencetak dua gol tambahan melalui Hidemata Morita menit ke-49 dan Yukinari Sugawara menit ke-69. **(Hit)**-f

Sultan:

Sambungan hal 1

Sultan mengatakan, tuntutan itu dilakukan untuk memperjelas posisi hukum atas Tanah Kasultanan yang selama ini diklaim oleh PT KAI sebagai bagian dari aktiva tetap mereka. Tanah yang disebut sebagai Sultan Ground itu, menurutnya, adalah aset yang sudah dipisahkan dari negara, tetapi tetap dikelola sebagai aset BUMN, bukan tanah negara. Dalam hal ini, PT KAI hanya memiliki hak guna bangunan (HGB) atas tanah tersebut, bukan hak kepemilikan. "Tidak ada masalah, itu kan aset yang dipisahkan dari negara. Sultan Ground itu menjadi aset BUMN, bukan PT KAI. Jadi, kita sepakat bahwa PT KAI tidak bisa mengklaim kepemilikan tanah itu tanpa putusan pengadilan," terang Sultan.

Sebelumnya, pihak Kraton Yogyakarta sudah lama berproses dengan melakukan komunikasi dengan PT KAI terkait hal tersebut. Tidak hanya dengan PT KAI saja, namun komunikasi juga sudah lama dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan. Proses pembatalan kepemilikan oleh PT KAI memang tidak serta merta bisa dikabulkan begitu saja. Jadi harus melewati gugatan.

Menurut Sultan, berapapun luasan tanah Sultan Ground yang dipergunakan oleh PT KAI tidak terlalu menjadi masalah. Karena pihaknya hanya ingin administrasi atas status tanah tersebut jelas. Jadi tidak ada hal yang perlu dirisaukan masyarakat. Karena, tanah Sultan Ground yang digugat tersebut nantinya tetap bisa dimanfaatkan oleh PT KAI untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. "Masyarakat tidak perlu risau. Pemanfaatannya tetap di PT KAI. Hanya status tanahnya saja diubah bukan BUMN. Kalau saya luasnya tidak penting yang penting administrasinya saja. Tidak ada perubahan apa-apa," tegas Sultan.

Seperti diketahui, gugatan resmi tersebut diajukan oleh GKR Condrokirono melalui kuasa hukum Kraton Yogyakarta, Markus Hadi Tanoto, pada 22 Oktober 2024 lalu di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam tuntutannya, Kraton meminta agar PT KAI dan Kementerian BUMN mencabut pencatatan atas tanah seluas 297.192 m2 yang terletak di area Stasiun Tugu Yogyakarta. Tanah tersebut, menurut Kraton, adalah bagian dari Tanah Kasultanan yang tidak boleh dicatatkan atas nama pihak lain tanpa persetujuan resmi.

Selain meminta penghapusan pencatatan kepemilikan tanah, penggugat juga mengharapkan agar PT KAI dan Kementerian BUMN tunduk pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan serta Undang Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kraton Yogyakarta dalam petitumnya meminta agar pencatatan aktiva tetap atas tanah ini dihapuskan dalam waktu 60 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama. **(Ria)**-d

Komisi III

Sambungan hal 1

yang menjerat Tom Lembong itu dituding sebagai politik balas dendam yang dilakukan rezim. "Kami mengusulkan ini dalam rangka juga membantu pihak kejaksaan, kami minta untuk membentuk Panja untuk mendalami kasus ini," katanya.

Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menghormati rencana Komisi III DPR RI yang akan memanggil Jampidsus untuk mendalami kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. "Kami menghormati rencana pemanggilan tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Jumat.

Menurut Harli, Jampidsus siap hadir apabila dipanggil oleh Komisi III DPR RI. "Tentu kami akan penuhi jika DPR memanggil Jampidsus untuk mendalami kasus dimaksud," ucapnya. **(Has)-f**

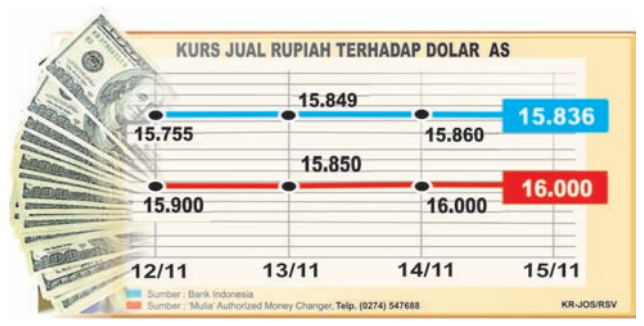

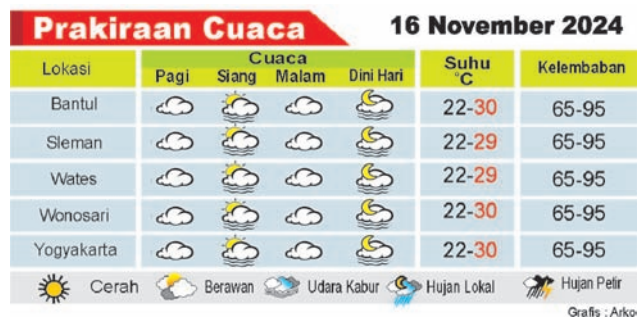

Dosen: Pahlawan tanpa Tanda Jasa?

Stara Asrita
Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

BUKAN hanya guru, dosen juga pantas mendapat julukan tanpa tanda jasa. Mengapa? Karena mereka juga berjuang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa melalui agar memiliki masa depan yang tangguh. Namun seringkali dosen masih harus berjuang dengan gaji kecil. Dilansir dari laman tempo.co, hasil penelitian Serikat Pekerja Kampus (SPK), mayoritas dosen di Indonesia menerima gaji bersih kurang dari 3 juta pada kuartal pertama tahun 2023. Hal itu menyebabkan 76 persen dosen harus mengambil kerja sampingan untuk menyambung hidup. Di sisi lain, dosen menjadi kurang termotivasi untuk menjalankan tugas dan kewajiban karena gaji yang diterima tidak sesuai. Padahal untuk menjadi dosen tidaklah mudah, mereka harus melanjutkan kuliah ke jenjang S2 bahkan S3 tentunya dengan biaya yang tidak murah.

Seorang dosen memiliki banyak kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, dosen menjadi sumber pengetahuan dan pembimbing utama bagi mahasiswa. Mereka menyampaikan ilmu, membuka wawasan, dan memberikan panduan untuk perkembangan akademis dan profesional mahasiswa. Dosen juga berperan untuk memberikan Pendidikan Karakter: Selain mengajarkan teori, dosen juga sering kali berperan dalam membentuk karakter mahasiswa. Mereka tidak hanya mengajarkan mata kuliah, tetapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi masa depan mahasiswa.

Bagi masyarakat, dosen memberikan pengabdian tanpa harapan, banyak dosen bekerja dengan dedikasi tinggi meskipun sering kali gaji mereka tidak sebanding dengan jumlah kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Mereka juga sering kali melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat tanpa mendapatkan penghargaan yang setimpal.

Sebagai tenaga pendidik, waktu dan tenaga dosen banyak habis untuk mempersiapkan materi kuliah, menilai tugas, dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Semua itu dilakukan dengan penuh dedikasi, meskipun mungkin tak selalu ada imbalan langsung. Dosen harus memiliki Kepedulian terhadap Mahasiswa, dosen sering kali menjadi figur yang membantu mahasiswa mengatasi tantangan akademik dan pribadi. Mereka memberikan bimbingan, nasihat, dan terkadang bahkan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa.

Meskipun mereka tidak selalu mendapat penghargaan atau pengakuan, banyak dosen merasa puas dengan kontribusi mereka dalam membentuk masa depan bangsa melalui pendidikan, karena ada juga yang bilang menjadi dosen itu adalah amal jariyah sehingga berapapun gaji yang diterima dianggap berkah. Namun untuk saat ini memang perlu memperjuangkan kesejahteraan dosen karena di sisi lain, dosen memiliki beban kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Peningkatan kesejahteraan dosen bukan semata mata demi pemenuhan hak saja, namun juga investasi masa depan bangsa. Dengan gaji yang layak, diharapkan dosen dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park